

## **SKRIPSI**



# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Kasus Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012)

**OLEH:  
MUH. MAHSYAR D.M.  
B 111 09 343**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Studi Kasus Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012)

**OLEH:**  
**MUH. MAHSYAR D.M.**  
**B 111 09 343**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2013**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

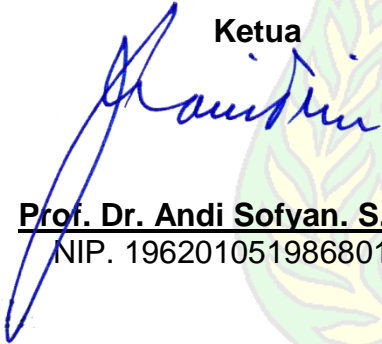
# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Kasus Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012)

Disusun dan diajukan oleh  
**MUH. MAHSYAR D.M.**  
**B 111 09 343**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

### **Panitia Ujian**


**Ketua**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H**  
NIP. 1962010519868011001

**Sekretaris**

  
**Hj. Haeranah, S.H., M.H**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MUH. MAHSYAR D.M.**

NomorInduk : **B 111 08 343**

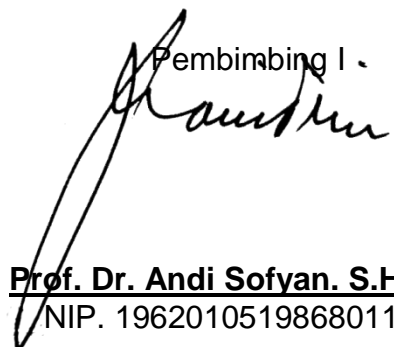
Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan  
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak  
(Studi Kasus Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2013

Pembimbing I .



**Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H**  
NIP. 1962010519868011001

Pmbimbing II



**Hj. Haeranah, S.H., M.H**  
NIP. 19661212 199103 2 002

## **PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI**

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MUH. MAHSYAR D.M.**  
NomorInduk : **B 111 08 343**  
Bagian : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian  
Yang Dilakukan Oleh Anak**  
(Studi Kasus Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**MUH. MAHSYAR D.M (B11109343), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kabupaten Mamuju 2010-2012), di bawah bimbingan Andi Sofyan Selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dan kedua untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Mamuju dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Mamuju, Pengadilan Negeri Mamuju dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah 1. Faktor Ekonomi, 2. Faktor Lingkungan 3. Faktor Pengawasan Orang Tua yang Kurang. Upaya anggota kepolisian Polres Mamuju untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak adalah 1. melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, 2. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah sekabupaten Mamuju, 3. mengadakan patroli dengan instansi terkait untuk meminimalisir kejahatan pencurian khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH



*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang suci.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkai kata Menjadi Kalimat, Kemudian membahasnya dan menyatukannya menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran dan konsentarsi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda H. Mansur, S. Farm dan ibunda Hj. Mariati yang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi Penulis agar dapat terus

melanjutkan studi. Apa yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal di mana Penulis harus membuktikan kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari Penulis, Muhaimin Indra Mansur, Mita Fitriani Mansur, St. Mega Puspikasari Mansur, dan Meriska Amalia Mansur yang telah memotivasi dan memberi semangat serta doa restu untuk penyelesaian skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H. dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji dalam proses penulisan Skripsi ini. Saya sangat bangga di Uji oleh Orang-orang hebat seperti beliau.
7. Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
8. Seluruh Dosen, seluruh staf serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepada Pihak Polres Mamuju, Pengadilan Negeri Mamuju, dan Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Barat yang telah banyak membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kepada keluarga besar Hiper maju Persukma yang baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan

kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Kepada saudara-saudara terbaik saya, Muh. Ilham Mansyur, Irwandi Kusuma Yasin, Andi Dede Suhendra Iskandar, Apriadi Arifin dan lain-lain yang tidak sempat Penulis sebut namanya, yang telah setia menemani Penulis dalam berbagai aktivitas selama menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada Kakanda Senior-senior terbaik saya, Andi Firdaus Samad, S.H, Mohammad Rahman, S.H, Syamsuriadi Kasim, S.H, Fuad Nasir Maidin, dan senior-senior lain yang tidak sempat penulis sebut namanya, yang telah menempa dan memberi motivasi kepada penulis.
13. Kepada Pelatih Timnas Sepak Bola Hukum Kakanda Muhammad Basit, S.H, yang telah melatih penulis dalam kegiatan berolahraga dan memberi motivasi kepada penulis.
14. Kepada teman-teman Doktrin 2009 FH UH, Arbiansyah Haseng, S.H Selaku Ketua Angkatan., Adventus Toding, S.H., Hadi Zulkarnain., dan lain-lain.
15. Kepada Teman-teman Komunitas LFPA ( Law Faculty Parking Area ) yang telah memberikan begitu banyak sumbangsih baik pikiran maupun semangat kepada penulis

16. Kepada Keluarga Besar UKM Sepak Bola tempat penulis menimba ilmu organisasi yang telah begitu banyak memberi penulis pelajaran yang berharga
17. Kepada Teman-teman dari STINDO, Syulham, Abdi, Aladin, Iwan, Agus, Iqbal Ahmad dan lain-lain, yang berjuang bersama di Kota Makassar dan jauh dari orang tua.
18. Kepada teman-teman seperjuangan di KKN Universitas Hasanuddin Gel. 82 Posko Desa Baringin, Muh. Nur Said, Hermin Andi, S.S, Muh. Ardhan Arwin, S.H, Muhammad Sadno, Mughni Latifah, Kepala Desa Baringin Bapak Drs. Made Amin beserta Keluarga Besar Bapak Hamzah D. dan Ny.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak kekurangan, olehnya itu dengan senang hati Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

*WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH*

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Makassar, Juli 2013

Penulis

**Muh. Mahsyar Darjunto Mansur**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 6
A. Kriminologi .....	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	10
3. Pembagian Kriminologi .....	12
B. Pengertian Pencurian.....	14
1. Jenis-jenis Pencurian.....	16
2. Unsur-unsur Pencurian .....	18
C. Kejahatan.....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19
2. Unsur-unsur Pokok Kejahatan .....	20
3. Klasifikasi Kejahatan.....	21
D. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak.....	22
1. Pengertian Anak .....	22
2. Hak-Hak Anak.....	26
E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan .....	30
1. Teori Klasik.....	31
2. Teori Neo Klasik .....	32
3. Teori Kartografi/Geografi .....	33
4. Teori Sosialis .....	34
5. Teori Tipologis .....	34
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	38
1. Pre-Emtif.....	39
2. Preventif .....	40
3. Represif .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik pengumpulan data .....	42
D. Analisis data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju .....	45
1. Data Pencurian Secara Umum di Kabupaten Mamuju .....	46
2. Data Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju.....	47
3. Tingkatan Pendidikan Pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju.....	48
4. Data Pekerjaan Orang Tua Pelaku Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju .....	49
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju .....	55
1. Upaya Preventif .....	56
2. Upaya Represif .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	halaman
<b>Tabel 1:</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju yang Dibedakan Menurut Jenis Kelamin antara Tahun 2010-2012.....	45
<b>Tabel 2:</b> Data kejahatan pencurian secara umum di Kabupaten Mamuju .....	46
<b>Tabel 3:</b> Kasus Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dikabupaten Mamuju.....	47
<b>Tabel 4:</b> Data Tingkatan Pendidikan Pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak.....	48
<b>Tabel 5:</b> Data Pekerjaan Orang Tua Pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak .....	49
<b>Tabel 6:</b> Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Dan di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman yang modern ini . manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi

di muka bumi ini, namun sering kali menemukan kegagalan, sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan paling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan tetap akan ada untuk merespon fenomena yang terjadi. Usaha yang dapat dilakukan yaitu hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operasi yang digunakan semakin canggih. Sarana pendukung kejahatan juga semakin bervariasi. Situasi dan kondisi tersebut, bila ditelusuri bukan berarti tidak ada pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan yang semakin berkembang, melainkan peristiwa kejahatan selalu mendapat perhatian yang baik oleh aparat yang berwenang maupun dukungan masyarakat, namun secara operasionalnya yang belum berjalan efektif.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kejahatan pencurian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian.

Dari berbagai pemberitaan di media massa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai pencurian menarik perhatian, mengusik rasa aman dan mengundang tanda tanya pada masyarakat apa yang telah terjadi ditengah masyarakat ini, terlebih lagi pencurian yg dilakukan oleh anak.



Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Anak adalah aset negara yang bisa memajukan bangsanya dimasa depan. Karena itu, kualitas mereka harus diproses dan dibentuk melalui perlakuan terhadap mereka sejak dini.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian khususnya mengenai tingkah lakunya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik terlepas dari anak tersebut sadar atau dalam keadaan tidak sadar dalam melakukannya sehingga dapat merugikan orang lain, terlebih lagi dapat merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi Sulawesi-Barat, tentu saja tidak luput dari kelakuan kejahatan. Misalnya saja pencurian, apalagi pencurian tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa juga dilakukan oleh anak. Di tahun 2010, sekiranya 10 kasus atau 8% dari kejahatan pencurian di kabupaten Mamuju yang ditangani kepolisian.

Pada hakekatnya banyak usaha dan kegiatan yang ditempuh pemerintah dan aparat hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, baik melalui penyuluhan hukum dan peningkatan sistem keamanan, maupun dengan cara penghukuman terhadap pelaku tindak

pidana pencurian, namun pada kenyataannya masih saja ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian.

Masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia.

Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi tindak pidana pencurian sekecil mungkin. Agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju.

Tindak pidana pencurian yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan Kriminologi, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2012”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang pemikiran di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar mereka lebih mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi, antara lain, menurut **Soejono Dirjosisworo** (1985:4) mengemukakan bahwa:

“Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.”

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama **Paul Topinard**

(Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.”

Kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut:

**Soedjono Dirjosisworo** (1976:24) memberikan definisi kriminologi adalah:

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.”

Demikian pula menurut **W.A. Bonger** (Topo Santoso,2003:9), mengemukakan bahwa, “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

Lanjut menurut **W.A.Bonger** (Topo Santoso,2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 2) Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan

masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.

- 3) Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan objeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut **W.A. Bonger** (Topo Santoso,2003:9) bahwa “kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain.”

Selanjutnya **W.A. Bonger** (Topo Santoso,2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

**Paul Moedigdo Meoliono** (Topo Santoso,2003:11), mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.”

Lanjut **Paul Moedigdo Meoliono** (Topo Santoso,2003:11)

memberikan definisi kriminologi:

“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.”

**Wolfgang Savita dan Jhonston** (Topo Santoso,2003:12)

memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh oleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Menurut **Michael dan Adler** (Topo Santoso,2003:12),

mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah:

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”

**Wood** (Abd Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi

bahwa:

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela”

Berdasar rumusan para ahli di atas tentang kriminologi, sepertinya mempunyai persamaan satu dengan lainnya, walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkan kriminologi berbeda, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang

berorientasi kepada kejahatan, mencari sebab orang melakukan kejahatan dan mencari mengapa orang menjadi jahat, sekaligus mencari cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan serta mendidik penjahat agar kembali baik di mata masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **Sutherland** (I. S. Susanto, 1990:10), kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukum, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut **A.S. Alam** (2010:2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanngar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.



Sedangkan dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu, pertama norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

### **3. Pembagian Kriminologi**

Menurut A.S. Alam (2010:4-7), kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

### **a. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya yang panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang tidak termasuk didalam kategori sosiologi kriminal adalah:
  - a) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan,
  - b) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan,
  - c) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar cuaca dan kejahatan.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah:
  - a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

- b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

#### **b. Kriminologis Praktis**

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini ialah:

- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga dan lainnya
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu

diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Pengertian Pencurian**

Pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari ketentuan tersebut, maka Pasal 362 KUHP merupakan pokok tindak pidana pencurian. Sebab semua unsur dari delik pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-pasal KUHP lainnya, tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau unsur peringanan.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum pada pasal tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Barang;
- 3) Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki.

Selanjutnya dikemukakan tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;
  - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika

perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Mengacu pada rumusan diatas, maka dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan, menurut **Moch. Anwar** (1994: 2.5), “Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.”

### **1. Jenis-jenis Pencurian**

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

#### **a. Pencurian biasa**

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

#### **b. Pencurian ringan**

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak

diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

- a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

### **c. Pencurian dalam keluarga**

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

## **2. Unsur-unsur Pencurian**

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif (Sudarto, 1990: 43).



Unsur-unsur tersebut antara lain:

**a. Unsur Subyektif:**

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk memiliki.

**b. Unsur Obyektif:**

1. Mengambil barang sesuatu.
2. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
3. Secara melawan hukum.

**C. Kejahatan**

**1. Pengertian Kejahatan**

Menurut **A. S. Alam** (2010: 16-17) ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu:

- 1) Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
- 2) Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Menurut **M. A. Elliat** ( Gumilang, 1993: 4) mengemukakan bahwa:

“Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan lain-lain.”

Menurut **Bonger** (Gumilang, 1993: 4) bahwa:

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara merupakan pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.”

Selanjutnya **Bonger** (A. S. Alam, 2010: 21) membagi kejahatan berdasar motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan
2. Kejahatan Seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI
4. Kejahatan lain-lain (*miscellaneuos crime*), misalnya penganiayaan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kejahatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosiologis. Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan masyarakat.

## **2. Unsur-unsur Pokok Kejahatan**

Menurut **A. S. Alam** (2010: 18-19) untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
2. Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Harus ada perbuatan;
4. Harus ada maksud jahat;
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

### 3. Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan:

Menurut **Bonger** (A. S. Alam 2010: 21) membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (***economic crime***), misalnya penyelundupan.
2. Kejahatan seksual (***sexual crime***), misalnya perbuatan zinah.
3. Kejahatan politik (***political crime***), misalnya pemberontakan PKI.
4. Kejahatan lain-lain (***miscelianeaus crime***), misalnya penganiayaan.

Sedangkan menurut **A. S. Alam** (2010: 21-23) membagi kejahatan berdasarkan berat atau ringan ancaman pidananya:

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian,dll.

Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selamalamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

#### **D. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu :

- a. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Pasal 330 KUHPidana berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila kerkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak dalam kedudukan belum dewasa”.

- c. Pasal 45 KUHPidana berbunyi “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun” namun ditiadakan dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Namun, diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pada Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) sampai Ayat 5 (lima) yaitu:
  - 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  - 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- f. Menurut Kartini Kartono (1981 : 187) bahwa
- “keadaan manusia normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya”.
- g. Menurut Romli Atmasasmita 1998 : 25) bahwa
- “seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin”.
- h. Undang-undang No. 12 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) berbunyi
- “orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”.

- i. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.

- j. Hukum Islam.

Menurut Sukiman Rasyid (1983 : 320) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum akil baliq. Hanya saja untuk melihat akan tersebut telah baliq atau belum, maka dapat dipedomani sebagai berikut :

- a. Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya;
- b. Untuk wanita, telah haid.

- k. Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum adat Indonesia sifatnya tidak tertulis. Menurut Subekti (1991 : 43) dalam hukum adat Indonesia kedewasaan adalah :

- 1) Dapat bekerja sendiri;
- 2) Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri;
- 4) Telah menikah;
- 5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Sedangkan menurut Subekti (1991 : 44) bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini :

1. Belum berumur 16 (enam belas) tahun;
2. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun, berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula, tetapi dianggap telah dewasa;
3. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-undang Pengadilan anak yaitu, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.



## 2. Hak-Hak Anak

Dalam konvensi PBB tentang hak anak yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention Of The Right Of The Child* menyebutkan butir-butir tentang hak-hak anak (Gatot Supramono, 2007 : 241-245), yaitu :

1. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, keluarga
4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Memperoleh informasi dan aneka sumber yang diperlukan
12. Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas

13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksplitasi) serta penyalahgunaan seksual
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah)
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban Negara
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
18. Memperoleh pelayanan kesehatan
19. Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi sosial)
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan social
21. Hak anak atas pendidikan
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
24. Perlindungan dari obat terlarang
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak
27. Melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
29. Hukum Acara Peradilan Anak
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau di luar pengadilan

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 (Gatot Supramono, 2007 : 7-8) mengatur pula hak-hak anak yang meliputi :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim

10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan social

#### **E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab terjadinya kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia meski telah ditetapkan sanksi yang berat bagi penjahat,

namun tetap saja terjadi kejahatan. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau teori-teori kriminologi. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut terdapat perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya.

**Made Darma Weda** (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

### 1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut **Beccaria** (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*”

Lebih lanjut **Beccaria** (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

“Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.”

Berdasar pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut (Purniati dkk., 1994:12) dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## **2. Teori Neo Klasik**

Menurut **Made Darwa Weda** (1996:15) bahwa:

“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas

perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.”

Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - i. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  - ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usilan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

### **3. Teori Kartografi/Geografi**

Teori kartografi yang berkembang di prancis, inggris, dan jerman.

Teori ini berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah

distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut **Made Darma Weda** (1996:16) bahwa:

“Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.”

#### **4. Teori Sosialis**

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darwa Weda 1996: 16) bahwa: “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

Berdasar pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

#### **5. Teori Tipologis**

Didalam kriminologi telah berkembang teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut **Lombroso** (Made Darma Weda 1996: 16-17) bahwa:

“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.”

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *Theory of imitation*.

Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan penelitian.

**Goring** (Made Darma Weda 1996: 18) berkesimpulan bahwa:

“Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.”

Menurut **Goring** (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa

“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.”

Dengan demikian menurut Goring kejahatan timbul karna faktor Psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

### **b. Teori Mental Tester**

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut **Goddard** (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa:

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.”

Berdasar pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

### **c. Teori Psikiatrik**

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Made Darma Weda 1996: 19) bahwa:

“Teori ini lebih menekankan pada unsur pada unsur psikologis, epilepsy dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.”

#### **d. Teori sosiologis**

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda 1996: 19) sebagai:

"Fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya."

#### **e. Teori Lingkungan**

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut **Tarde** (Made Darma Weda 1996: 20):

"Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi."

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan.

Berdasar pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, Sama seperti teori sosiologis menurut Made Darma Weda.

#### **f. Teori Biososiologi**

Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut **Made Darma Weda** (1996: 20) bahwa:

“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara”

#### **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkan dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak pemerintah maupun warga masyarakat juga ikut terlibat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan **A. S. Alam** (2010: 79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam

usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-entif faktor niat tidak terjadi.

## **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi-Barat, yaitu tepatnya pada, Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, dan Kepolisian Resort Mamuju. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Mamuju dengan pertimbangan bahwa, pada daerah tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur, dan menjadi perhatian masyarakat.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak Kepolisian Resort, Kementrian Hukum Dan Ham Sulawesi Barat dan yang sehubungan dengan penelitian ini,
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data yang ada di lapangan seperti tabel-tabel dan arsip dokumen,

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian,
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji,
3. Daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis.



#### **D. Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat dengan posisi 10 38' 110'' - 20 54' 552'' Lintang Selatan dan 110 54' 47'' – 130 5' 35'' Bujur Timur dari Jakarta; (00 0' 0'' Jakarta = 1600 48' 28'' Bujur Timur Green Wich). Kabupaten Mamuju yang beribukota di Mamuju Berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Mamuju Utara
Sebelah Timur	: Kabupaten Luwu Utara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Tana-Toraja
Sebelah Barat	: Selat Makassar

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 794.276 Ha, secara administrasi pemerintahan terbagi atas 16 kecamatan, terdiri dari 143 desa, 10 kelurahan dan 2 UPT. Kecamatan Kalumpang adalah kecamatan terluas dengan luas 1.731,99 km<sup>2</sup> atau 21,81 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Kecamatan Balabalakang luas wilayahnya 21,86 km<sup>2</sup> atau 0,28 persen merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Mamuju.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Mamuju dari Tahun 2010-2012 yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju yang Dibedakan**  
**Menurut Jenis Kelamin antara Tahun 2010-2012**

Jenis kelamin	Tahun		
	2010	2011	2012
Laki-laki	162.501 Jiwa	173.413 Jiwa	179.896 Jiwa
Perempuan	152.552 Jiwa	163.560 Jiwa	169.675 Jiwa
Jumlah	315.053 Jiwa	336.973 Jiwa	349.571 Jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2012 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tiap tahun cukup tinggi.

#### **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Mamuju**

Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di Kabupaten Mamuju tempat Penulis melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian di kantor Kepolisian dan Pengadilan setempat mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sisi kriminologis. Berdasarkan data yang diperoleh Penulis terkait kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, ditemukan adanya kasus terhitung dari 2010 sampai akhir tahun 2012 meskipun agak kurang signifikan tetapi hal ini bisa saja menjadi sesuatu yang harus dipikirkan bagaimana

penanggulangannya mengingat kabupaten Mamuju akan menjadi salah satu kota besar di Indonesia.

Sebelum memasuki pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, terlebih dahulu penulis akan memaparkan data kejahatan pencurian secara umum, data kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, data tingkatan pendidikan pelaku, dan data pekerjaan orang tua pelaku.

### **1. Data Pencurian Secara Umum di Kabupaten Mamuju**

Sebelum membahas tentang kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, terlebih dahulu penulis memaparkan kasus kejahatan pencurian secara umum yang terjadi di kabupaten Mamuju dalam kurun waktu tahun 2010-2012 hal ini cukup penting untuk dijadikan perbandingan antara kejahatan pencurian secara umum dengan kejahatann pencurian yang dilakukan oleh anak.

Data Laporan tentang kejahatan pencurian secara umum yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Mamuju mulai tahun 2010-2012 :

**Tabel 2**  
**Data kejahatan pencurian secara umum di Kabupaten Mamuju**

NO	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian
1	2010	121 Kasus
2	2011	114 Kasus
3	2012	83 Kasus

Sumber Data: Polres Mamuju

Dari Tabel di atas terlihat jelas bahwa kejahatan pencurian yang terjadi dikabupaten Mamuju terjadi penurunan dari tahun 2010 ke tahun

2011 dan terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2012.

## 2. Data Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

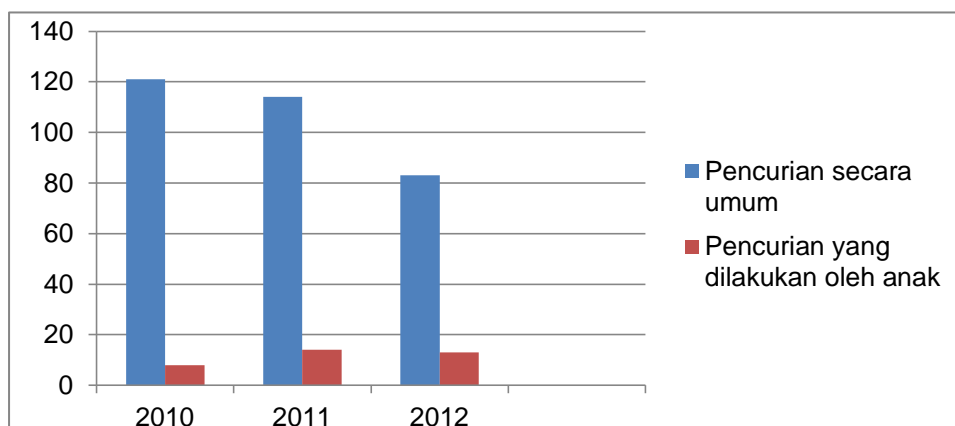
Setelah membahas kasus pencurian secara umum di kabupaten Mamuju, selanjutnya pembahasan pokok utama dari penulisan ini yaitu kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

**Tabel 3**  
**Kasus Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dikabupaten Mamuju**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	8 Kasus
2	2011	14 Kasus
3	2012	13 Kasus

sumber data: Polres Mamuju

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan terjadi penurunan cukup sedikit dari tahun 2011 ke tahun 2012. Adapun grafik perbandingannya sebagai berikut:



Berdasarkan grafik perbandingan di atas, jumlah kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sedikit hanya 8 kasus dari 121 kasus kejahatan pencurian secara umum pada tahun 2010, terjadi peningkatan pada tahun 2011 tetapi kasus kejahatan pencurian secara umum mengalami penurunan yakni 14 kasus dari 114 kasus, dan terjadi penurunan cukup sedikit dibandingkan dari penurunan kasus kejahatan pencurian secara umum yakni ada 13 kasus dari 83 kasus.

### **3. Tingkatan Pendidikan pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh anak**

Pendidikan merupakan instrument yang penting dalam pengembangan jiwa dan intelektual seseorang yang mana diharapkan dapat terbentuk kepribadian yang baik dalam menghadapi kehidupan.

Berikut penulis akan mencantumkan data tentang tingkat pendidikan pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju :

**Tabel 4**  
**Data Tingkatan Pendidikan Pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	4
3	SMA	2
4	Tidak Bersekolah	8
	Jumlah	15

Sumber data: Hasil Kuisisioner 4-6 Juni 2013

Dari data yang diperoleh penulis pada kuisioner penelitian tersebut, dapat diketahui jenjang pendidikan para pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 15 anak yang dijadikan responden oleh penulis, terlihat jelas bahwa pelaku kejahatan mempunyai pendidikan yang cukup rendah bahkan ada yang tidak bersekolah atau putus sekolah, dimana 1 orang yang berpendidikan tingkat sekolah dasar, 4 yang berpendidikan sekolah menengah pertama, 2 yang berpendidikan tingkat sekolah menengah atas, dan 8 yang tidak bersekolah.

#### **4. Data Pekerjaan orang tua Pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak**

Pada umumnya pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, tergolong berpenghasilan rendah, bahkan ada yang tidak bekerja, namun lemahnya pengawasan orang tua dianggap bisa menjadi faktor penyebab kejahatan ini . Oleh Karena itu selain untuk kelangsungan hidup mereka, ada juga karena faktor pengawasan orang tua yang kurang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Data Pekerjaan Orang Tua Pelaku Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	0	0%
2	Petani/Berkebun	4	27%
3	Nelayan	3	20%
4	Buruh Harian	1	7%
5	Tukang Ojek/Becak	2	13%
6	Tidak Bekerja	5	33%
Jumlah		15	100%
Sumber Data: Hasil Kuisisioner 4-6 Juni 2013			

Pada tabel di atas terlihat jelas bahwa memang rata-rata pekerjaan orang tua para biduan adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah. 4 orang yang orang tuanya bekerja sebagai petani/berkebun atau sekitar 27% dari semua jumlah responden, 3 orang yang orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan atau sekitar 20%, 1 orang bekerja sebagai buruh harian atau sekitar 7%, dan orang tuanya yang tidak bekerja yang tertinggi yakni 5 orang atau sekitar 33% dari jumlah responden

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Mamuju, penulis akan memaparkan hasil penelitian baik itu melalui hasil kuisisioner maupun dari hasil wawancara dengan instansi terkait

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kuisisioner, dapat melihat tabel dan hasil wawancara sebagai berikut

**Tabel 6**  
**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Yang**  
**Dilakukan Oleh Anak**



No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase (%)
1	Kondisi Ekonomi	4	20%
2	Faktor lingkungan	6	60%
3	Lemahnya pengawasan Orang Tua	3	13%
4	Faktor Pendidikan yang kurang	2	7%
5	Pengaruh Alkohol	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber Data: Hasil Kuisisioner 4-6 Juni 2013

#### **a. Faktor Ekonomi**

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup.

Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian

Berdasarkan tabel 6 di atas, terlihat bahwa faktor ekonomi tertinggi ke dua dari faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

#### **b. Faktor Lingkungan**

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang

besar pada pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingin memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka kemudian mencari cara untuk memilikinya juga meskipun dengan cara mencuri uang atau mencuri barang tersebut.

Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah anak yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi. Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan dan sebagainya.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, faktor lingkungan ini yang mendominasi daripada faktor-faktor lain penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Mereka awalnya adalah anak yang baik, tetapi sejak mereka tinggal dilingkungan yang pergaulannya salah mereka akan ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan oleh anak dilingkungan yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian.

### **c. Kurangnya Perhatian/Pengawasan Orang Tua**

Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Selain pengajar atau guru di sekolah yang mendidik anak untuk berkelakuan baik, orang tua di

rumah juga turut aktif untuk membantu berkelakuan baik, karena waktu anak di sekolah hanya sedikit.

Kurangnya perhatian orang tua kepada anak bisa saja merubah sikap dan perilaku anak tersebut, bisa saja mereka melakukan keinginan mereka meskipun dengan cara yang bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang tua termasuk melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan tabel 6 di atas, dimana ada 3 responden yang kurang mendapat perhatian dari orang tua atau 13% yang akhirnya melakukan kejahatan pencurian untuk menghibur diri dan untuk mencari cara agar mendapat perhatian dari orang tua.

#### **d. Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan anak juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Berdasarkan tabel 4 pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan tidak berpendidikan, ini menandakan bahwa anak di Kabupaten Mamuju masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain faktor- faktor yang dapat disimpulkan dari hasil kuisioner atau keterangan langsung dari para pelaku, penulis juga akan memaparkan hasil wawancara dengan instansi terkait.

Menurut Briпка.Priyanto,S.E selaku kanit. Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mamuju (Wawancara 13 Juni 2013), faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain:

1. Faktor lingkungan yang sangat kurang baik bagi anak apalagi dilingkungan tersebut sering terjadi kejahatan terutama kejahatan pencurian
2. Faktor ekonomi yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan anak, maka anak tersebut melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri
3. Faktor lemahnya pengawasan orang tua kepada anak yang mengakibatkan si anak untuk melakukan kejahatan pencurian
4. Masih kurangnya petugas yang menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Mamuju.

Sedangkan Menurut Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Syafruddin, S.H. ( wawancara 07 Juni 2013 ) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada anak yang tinggal dilingkungan social yang sangat buruk maka bisa saja sifat dia menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan melakukan kejahatan.
2. Faktor kepedulian orang tua sangat kurang, yang mengakibatkan akhlak anak juga menjadi buruk.

3. Faktor ekonomi, banyaknya anak yang putus sekolah mengakibatkan moral mereka menjadi kurang baik sehingga mereka rentan melakukan tindakan kejahatan.

Sependapat dengan Syafruddin, Kepala sub. Bidang Bimkemas Latkepro Perlindungan Anak Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, Amran Amin, S.H ( wawancara 09 Juli 2013 ) faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Faktor lingkungan yang kurang baik bagi keberlangsungan hidup anak, sehingga kebanyakan anak mengikuti aktivitas anak disekitar tempat tinggalnya biarpun itu kebiasaan buruk.
2. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap si anak juga sangat mempengaruhi sikap dan kebiasaan anak.
3. Faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab anak melakukan kejahatan pencurian demi memenuhi kesenangannya.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju**

Setelah penulis mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, selanjutnya akan dipaparkan mengenai upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yakni Kepolisian Resort Mamuju.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai

generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju.

Menurut Bripka. Priyanto, S.E. Kanit. PPA Polres Mamuju ( wawancara 13 Juni 2013 ), ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yakni:

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya Preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

- a. Mengadakan patroli keliling di Kabupaten Mamuju.
- b. Menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah.

- d. Melakukan pendataan terhadap genk-genk motor yang ada di Kabupaten Mamuju.

## **2. Upaya represif**

Upaya represif, merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan ( menghapuskan ) Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim 1418 Mamuju di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti di Rumah Adat Mamuju karena di tempat inilah yang paling sering dijadikan anak muda di Kabupaten Mamuju sebagai tempat melakukan tindakan maksiat dan melakukan penyuluhan/pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan memberi arahan sekaligus memberi tahu orang tua tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak bersangkutan, sehingga memberi efek jera dan memunculkan rasa malu.

Menanggapi komentar diatas, Penulis menyimpulkan bahwa selain kurang aktifnya aparat Kepolisian dalam mencari informasi dari masyarakat ,pengawasan orang tua yang kurang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Penulis, Penulis menemukan bahwa pihak Kepolisian jarang terlihat melakukan patrol. Biasanya kepolisian hanya melakukan patrol menjelang perayaan tahun baru, menyambut bulan suci ramadhan dan menyambut perayaan natal, padahal dihari-hari biasa sering terjadi kejahatan ini dalam

upaya menekan tingginya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut tanggapan penulis hal ini sangat perlu dilakukan pihak kepolisian guna menekan semakin banyaknya terjadi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian diatas, Penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak

1. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli jangan hanya dilakukan pada hari tertentu tetapi dihari-hari biasa, setidaknya sekali dalam dua minggu
2. Aparat Kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam menekan kejahatan ini
3. Aparat Kepolisian serta instansi pemerintah setempat yang terkait perlu mengadakan penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disamping itu pula penulis memberi saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju.

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dipandang sangat meresahkan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju yaitu:
  - a. Faktor ekonomi, dimana rata-rata pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah bahkan ada yang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, bahkan ada yang melakukan kejahatan pencurian ini karena ingin memiliki suatu

barang cukup mahal tetapi tidak sanggup untuk membelinya maka dengan cara mencuri barang tersebut atau mencuri barang lain yang bisa menghasilkan uang untuk mendapatkan barang tersebut.

- b. Rendahnya tingkat pendidikan anak yang melakukan kejahatan pencurian, sebagian besar bahkan ada yang tidak bersekolah hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, serta moral pelaku
  - c. Faktor lingkungan sosial, ada diantara para pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan ikut-ikutan oleh anak lain yang sudah terbiasa melakukan kejahatan pencurian
  - d. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua kepada anak dapat merubah kondisi jiwa, fisik, dan kebiasaan anak. Rendahnya akhlak anak serta imannya dikarenakan kurangnya perhatian dan arahan orang tua tentang agama yang mengakibatkan anak melakukan suatu kejahatan bukan saja kejahatan pencurian tetapi kejahatan-kejahatan yang lain.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu:
- a. Upaya yang bersifat preventif antara lain:

1. Melakukan patrol keliling di wilayah hukum Kabupaten Mamuju
  2. Penempatan personil Kepolisian di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian.
  3. Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak dan sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju.
  4. Mendata genk-genk motor di Kabupaten Mamuju.
- b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya:
1. Melakukan razia di rumah adat Mamuju yang biasa menjadi tempat para pelaku pencurian menikmati hasil pencuriannya
  2. Melaksnakan penyuluhan/pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan pencurian, dan memberitahukan kepada orangtua anak yang bersangkutan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak untuk memberi efek jera dan rasa malu.

## **B. Saran**

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menaggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Mamuju yakni:

1. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patroli dan razia-razia di tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian.
2. Kiranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat bisa melaksanakan sosialisasi di lingkungan yang biasa terjadi tempat kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

3. Pemerintah senantiasa menjaga penuh Rumah Adat Mamuju karena menurut penulis rumah adat itu adalah tempat yang sangat sakral bukan tempat untuk melakukan kegiatan maksiat.
4. Para orang tua harus lebih mengontrol anak mereka setidaknya dengan menjaga ibadahnya penulis sangat yakin dengan ibadah yang sangat rajin dan ikhlas dapat menghindarkan anak dari perbuatan kejahatan.
5. Pemerintah Kabupaten Mamuju harus lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan tingkatan pendidikan di Kabupaten Mamuju, setidaknya membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan mengingat Kabupaten Mamuju kaya akan hasil alam dan memberi bantuan perlengkapan sekolah kepada mereka yang kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini penting untuk menjaga moral anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar
- Anwar, Moch. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jilid II. Cipta Aditya: Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia: Bogor.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*. Bandung: Angkasa.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung.
- Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT Grafindo Persada: Jakarta
- Sudarto, R.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung: Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo: Jakarta.

### Sumber-sumber lain:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 12 Tahun 1948 Tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 1990 Tentang  
Pengesahan *Convention Of The Right Of The Child*.

<http://jaringskripsi.wordpress.com> , di akses pada hari Jumat, Tanggal 1  
Maret 2013, Pukul 16:40 wita